RUU DAERAH KEPULAUAN

AKD: RUU DAERAH KEPULAUAN

Bulan: Juli 2024

Oleh: RUU DAERAH KEPULAUAN

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

RUU Daerah Kepulauan akan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera, tetapi juga mencapai pulau-pulau kecil dan terpencil. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan. Supaya mencapai langkah dan kebijakan strategis dalam pengelolaan daerahnya masing-masing.

Adapun RUU Daerah Kepulauan ini sudah sekitar 20 tahun dibahas oleh DPR RI dan DPD RI, namun persoalannya kembali ke pemerintah. Meski Presiden sudah terbitkan Surat Presiden (Surpres), tapi dalam pembahasannya banyak kendala. Khususnya terkait masalah kelautan. Ini pula yang membuat Menkopolhukam RI enggan melanjutkan RUU inisiatif DPD RI tersebut.

Di kesempatan yang sama Anggota Komisi V Emanuel Melkiades Laka Lena (Melki) menyampaikan ada tiga hal yang menjadi perhatian di Indonesia Timur, yaitu pengelolaan sumber daya alam (SDA), administrasi birokrasi dan pelayanan kesehatan. "Itu program prioritas.yang bisa mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerah kepulauan. Khususnya di Indonesia Timur," ujarnya.

Di forum sama, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengatakan terkendalanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan adalah akibat kurangnya keinginan politik (political will) pemerintah meskipun banyak kalangan mendukung kehadiran produk legislasi tersebut termasuk DPR.

RUU atas inisiatif DPD itu didasarkan pada kian besarnya tantangan terkait pelayanan publik selain sebagai upaya untuk menangani kesenjangan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kehadiran UU tersebut sekaligus merupakan bentuk kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia.

https://dpr.go.id/berita/detail/id/50461/t/RUU+Daerah+Kepulauan%2C+Upaya+Pemerataan+Kesejahtaraan+Daerah+Terpencil

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	DPD Minta Kejelasan Nasib Pembahasan RUU Daerah Kepulauan	https://www.hukumonline.com/be \nrita/a/dpd-minta-kejelasan-nas \nib-pembahasan-ruu-daerah-kepul \nauan-lt637f157d7abbe/
Berita	DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia	https://www.dpd.go.id/daftar-b \nerita/dpd-ri-ruu-daerah-kepula \nuan-jadikan-indonesia-poros-ma \nritim-dunia
Berita	Menanti RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan	https://koran.tempo.co/read/in \nfo-tempo/480090/menanti-ruu-da \nerah-kepulauan-segera-disahkan
Berita	RUU Daerah Kepulauan Bersentuhan Dengan Kesejahteraan Masyarakat	https://www.dpr.go.id/berita/d \netail/id/42782/t/RUU%20Daerah% \n20Kepulauan%20Bersentuhan%20De \nngan%20Kesejahteraan%20Masyara \nkat
Berita	RUU Daerah Kepulauan, Upaya Pemerataan Kesejahtaraan Daerah Terpencil	https://www.dpr.go.id/berita/d \netail/id/50461/t/RUU%20Daerah% \n20Kepulauan,%20Upaya%20Pemerat \naan%20Kesejahtaraan%20Daerah%2 \n0Terpencil
Dokumen	Laporan Singkat Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nberkas.dpr.go.id/akd/dokumen/R \nJ3-20190425-125835-4820.pdf
Undang-undang & Peraturan	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN	https://berkas.dpr.go.id/akd/d \nokumen/RJ2-20190425-125010-822 \n7.pdf
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Daerah Kepulauan	chrome-extension://efaidnbmnnn \nibpcajpcglclefindmkaj/https:// \nberkas.dpr.go.id/akd/dokumen/R \nJ2-20190425-125010-8227.pdf